

Memperingati Hari Lahir HB IX

HB IX "Merengkuh" Indonesia

Oleh : Suryo Adi Pramono

DI dalam konteks DIY tengah mempersiapkan serangkaian Raperda Keistimewaan, kiranya kita perlu merefleksikan peran Hamengku Buwono (HB) IX. Yogyakarta menjadi "Daerah Istimewa" berkat visi, komitmen dan peran HB IX di awal pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muncul pertanyaan, siapakah sosok HB IX dan mengapa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat didekonstruksikannya dari sebuah negara berdaulat menjadi "sekadar" sebuah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam NKRI?

Sosok HB IX

Membaca *Perubahan Sosial di Yogyakarta* karya Selo Soemardjan, seorang sosiolog, Penewu Keraton dan sekaligus Sekretaris Pribadi HB IX, saya mendapatkan kesan mendalam mengenai sosok HB IX. Analog dengan perjalanan Jaka Tingkir, putra Ki Ageng Kebo Kenanga di Pengging, yang diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir (isteri saudara seperguruan Ki Ageng Kebo Kenanga) di Desa Tingkir, yang lalu berguru ke Ki Ageng Banyubiru, Ki Ageng Sela, dan sebagainya, sebelum akhirnya menjadi raja di Pajang, HB IX juga melakukan *tapa brata* dengan *mondok* di sejumlah keluarga Belanda dan bersekolah di beberapa kota. Selain di Yogyakarta (HIS), *Sampeyan Dalem* juga bersekolah di Semarang (MULO) dan Bandung (AMS), dan bahkan ke Harlem, dan kemudian ke Leiden (Rijkuniversiteit) di Negeri Belanda.

Ini "berkelana" dalam dialog kultural, menempa karakter, kemampuan akademik dan mempersiapkan peran-nya di masa datang. Dalam proses itu, ia seakan berdialog antara siapa dirinya dan bagaimana peradaban dunia tengah berlangsung dan bergerak pada masa itu. Ia mungkin berada di dalam tegangan antara "tradisionalitas" Jawa dan "modernitas" Barat, antara "aristokrasi" dan "demokrasi", antara "paguron" dan "pendidikan tinggi", antara "tradisi lokal" dan "tradisi mondial", antara bagian dari "bangsa dijajah" dan "bangsa penjajah", antara "laku spiritual Jawa" dan "s sofistikasi kognisi ilmiah Barat", dan sebagainya. Tidak hanya berhenti di dalam "proses antagonistik" itu, ia ternyata melampauinya dengan mencoba mencari jalan "memadukan dan meramunya" bagi "Nagari Dalem" nantinya.

Apa yang terjadi kemudian? Dalam tulisan Soemardjan, HB IX berusaha memajukan Yogyakarta ke kancas peradaban modern. Ia berusaha menyelami "ortodoksi" Keraton Jawa, menangkap makna esensialnya, lalu membawanya ke luar, berjumpa dan menjadi bagian integral peradaban modern.

Meskipun dibesarkan dan dididik dalam peradaban Barat melalui berbagai lingkungan keluarga dan pendidikan Belanda, ia tidak kehilangan jati diri. Ia tetap seorang

Jawa, bangsa Indonesia, yang tengah dijajah oleh bangsa lain, sehingga tetap nasionalis. Bagaimanapun juga, di dalam dirinya mengalir darah ksatria Jawa. Maka, ketika dinobatkan, Sri Sultan HB IX mengucapkan kalimat yang terkenal: "Saya memang berpendidikan Barat tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa."

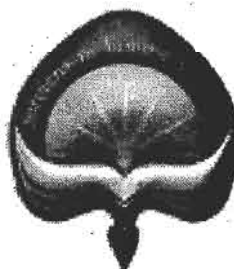
Sebagai orang Jawa, secara genealogi historis, ia memang memiliki trah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan Pangeran Mangkubumi pada 1757. Dari darah Pangeran Mangkubumi (HB I), sejarah menunjukkan ia berdarah bangsawan Keraton Mataram yang embrional didirikan Ki Ageng Pemanahan di atas Tanah Mentaok. Desa ini dikembangkan menjadi keraton oleh puteranya, Danang Sutawijaya (Panembahan Senopati), dan kemudian mencapai puncak kejayaannya oleh Panembahan Hanyakrakusuma atau Prabu Pandita Hanyakrakusuma, yang kemudian berganti gelar menjadi Sultan Agung, yang sangat terkenal karena penyerangan ke Batavia.

Siapakah Ki Ageng Pemanahan? Ia adalah putra Ki Ageng Henis, cucu Ki Ageng Sela, dan cicit Ki Ageng Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa adalah putra Bondan Kejawan yang menikah dengan Nawangsih (puteri Jaka Tarub) di Desa Tarub. Sedangkan Bondan Kejawan adalah putra Brawijaya V, Raja Keraton Majapahit, yang sebagai lembu peteng dititipkan kepada Ki Ageng Tarub. Dengan demikian, Ki Ageng Pemanahan tidak memiliki garis keturunan dari Keraton Pajang dan Demak. Meskipun semuanya berdarah Majapahit, tetapi aliran darah langsung Ki Ageng Pemanahan justru melalui Bondan Kejawan. Ki Ageng Pemanahan memang saudara seperguruan Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang mendirikan Keraton Pajang, yaitu ketika keduanya berguru Ki Ageng Sela, kakek Ki Ageng Pemanahan.

Dalam sejarah Majapahit, Nusantara dipersatukan oleh Mahapatih Gadjah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Persatuan Nusantara dikumandangkan melalui Sumpah Amukti Palapa oleh Patih Gadjah Mada bukan pada masa Prabu Hayam Wuruk, melainkan pada era sebelumnya, pemerintahan ratu puteri: Tribhuwana Tungadewi, yang menggantikan Prabu Jayanegara. Apa kaitan sejarah ini dengan peran HB IX?

Merengkuh Indonesia

Mencermati peristiwa "penyatuan" Nusantara dan "penggabungan" Nagari Ngayogyakarta Hadi-



FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ATMAJAYA
YOGYAKARTA

ningrat ke dalam NKRI, maka kita dapat menafsirkan bahwa HB IX tengah mengerjakan "proyek Nusantara" melalui pendirian Indonesia. Meskipun secara politik perjuangan kemerdekaan HB IX menjadi bagian gerakan nasionalis memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, namun secara historis ia pun tengah *nguri-uri* warisan nenek moyangnya zaman Majapahit: Nusantara.

Oleh karena itu, ketika DIY "menyelamatkan" Indonesia dengan "memberikan diri" sebagai *Ibukota* Negara dan "merengkuh" keselamatan dan keberadaannya NKRI (1946-1949), itu adalah bagian dari *mikul dhuwur* prestasi capaian leluhur, karena dalam dirinya mengalir darah tiga keraton: Ngayogyakarta, Mataram dan Majapahit. Selain menjadi Menteri Negara dan Menteri Pertahanan beberapa kabinet, HB IX aktif dalam perundingan di Den Haag agar RI memperoleh pengakuan kedaulatan Belanda: memastikan Nusantara telah tertransformasikan ke dalam Indonesia.

Dalam *Takhta Untuk Rakyat* dikisahkan, saat sebelum *Clash* Kedua di Yogyakarta, Sultan berunding dengan Belanda dengan mewakili adiknya, Pangeran Bintoro (kemudian menjadi Anggota BPUPKI). Pada perundingan itu Sultan diminta tidak ikut campur masalah Republik Indonesia (menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota) dan sebagai imbalannya Belanda memberikan kekuasaan atas tanah bekas Keraton Mataram meliputi Kedu, Solo, Madiun, Kediri, dan Banyumas. Setelah ditolak, pada perundingan ke-2 Belanda menambahkan imbalan kekuasaan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura. Tawaran ini pun ditolak Sultan. Panglima Belanda untuk Wilayah Jawa, Jenderal Spoor, lalu menyerbu nagari dalem dan mendatangi gerbang keraton dengan tiga panser memaksa masuk. HB IX menyambutnya di gerbang

Alun-Alun Keraton Utara dan berkata, "Anda dapat memasuki Keraton tapi harus melangkah mayat saya." Belanda pun mundur dari Keraton tetapi tetap mengurung Keraton. Karena tidak bisa keluar, HB IX memerintahkan abdi dalem Selo Soemardjan menghubungi Panglima Soedirman dan Soeharto untuk merencanakan serangan (dikenal dengan "Serangan Oemoem 1 Maret").

Bukan hanya berhenti di sana, dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan pengakuannya dari mantan penjajahnya, dilihat dari perspektif mondial, Sultan HB IX sebenarnya tengah bergulat

dalam perjuangan Hak Asasi Manusia, bahwa "kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan." HB IX tengah menjadi *ngarsa dalem* dengan turut menjadi pemimpin (*pangarsa*) dalam perjuangan kemerdekaan, penegakan HAM dan mengenyahkan penjajahan. Bersama berbagai pemimpin pergerakan dunia lain, yang masing-masing berjuang untuk kemerdekaan bangsanya, HB IX bersama para pemimpin bangsa turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia berada dalam arus gelombang besar dunia saat itu, yaitu nasionalisme, yang tengah menghantam kolonialisme dan imperialisme. Ia berjuang tanpa pamrih, selain untuk rakyat, bangsa dan negara tercinta: Indonesia.

Ke dalam, sebagaimana tulisan Soemardjan, HB IX menganalkan demokrasi desa. Struktur keraton yang tidak menyertakan desa dalam pemerintahan diperbaharui dengan membentuk DPR Desa. Ia mencatat bagaimana kebingungan warga pada saat itu. Demokratisasi belum dipahami oleh *kawula dalem* yang terbiasa mengikuti *ritah dalem*.

Apa yang kita pelajari? HB IX mencoba melakukan "proyek demokratisasi" di dalam pemerintahannya, yang menjadi bagian dari sebuah republik. Inilah yang kemudian secara keseluruhan di antaranya kita dapat pahami dalam bukunya yang berjudul *Takhta Untuk Rakyat*. Dalam konsep ini, ia menjadi *ngarsa dalem* (ketika menjadi pemimpin yang bertahan) dan sekaligus menjadi "pengabdi" rakyat yang dicintai (*sampeyan dalem*). Ini justru sangat visioner ketika kita kemudian melihat pada 1999 ada Badan Perwakilan Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, di mana "parlemen desa" dipilih oleh warga desa.

Oleh sebab itu, adalah mengecilkan semangat beliau bila kini Yogyakarta hendak dijadikan replika bangsa lain tanpa bertumpu pada budaya dan semangat perjuangan sendiri, yaitu Jawa, dengan tetap merengkuh Indonesia. Dalam konteks "Keistimewaan". Yogyakarta tidak perlu dijadikan "Serambi Madinah" atau "New York", atau yang lain, tetapi biarlah tetap menjadi diri sendiri berbasis rangkaian sejarahnya; tetap berdaulat dan berkebudayaan Indonesia".

Menziarahi pesarean dan petisan para leluhur Keraton Ngayogyakarta sampai Majapahit menjelang wiyosan dalam HB IX pada setiap 12 April barangkali sangat membantu menghayati kembali makna jati diri, semangat dan nilai budaya Yogyakarta, apalagi dalam konteks penyusunan Raperda Keistimewaan sekarang. Semoga! ***

Suryo Adi Pramono, Pengajar Prodi Sosiologi FISIP UAJY